

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Makna dan Konsep Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah “korupsi” berasal dari bahasa Latin “*corruptio*” atau “*corruptus*”. Kata “*corruptio*” berasal dari kata “*corrumpere*”, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin kemudian dikenal dengan istilah “*corruption, corrupt*” (Inggris), “*corruption*” (Perancis) dan “*corruptie atau korruptie*” (Belanda). Arti kata korupsi adalah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.¹

Istilah korupsi menurut para ulama dianalogikan dengan kata *al-ghulul*, yaitu pengkhianatan terhadap amanah dalam pengelolaan harta rampasan perang (ghanima), sebuah kata yang diambil dari ayat al-Quran surah Ali Imran ayat 161:

الَّذِينَ قَالُوا لِلْأَخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَأُوا عَنْ

أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (ال عمران: ١٦٨)

“Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhiantinya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan

¹ Daru Wijayanti, *Revolusi Mental Menumbuhkembangkan Jiwa Anti Korupsi*, (Yogyakarta: Indoliterasi, 2016), cet 1, hlm. 18.

(pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya” (Ali Imran: 161)²

Menurut Subekti dan Tjirosoedibio dalam kamus hukumnya *corruptie* adalah korupsi, perbuatan curang, perbuatan curang tindak pidana yang merugikan keungan negara (Subekti dan Tjitrosoedibio: 1973).³

Sedangkan Baharudin Lopa mengutip pendapat David M. Chalmers, menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni menyangkut masalah penyuapan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan menyangkut bidang kepentingan umum. Hal ini diambil dari defenisi yang berbunyi “*financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt*”.⁴

Menurut Suradi korupsi sebagai tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain mencakup penyuapan, konflik kepentingan, pemaksaan yang bersifat ekonomi, dan pemberian secara tidak sah.⁵

Jadi korupsi adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dalam rangka memperkaya diri sendiri ataupun orang lain yang menyangkut bidang politik, ekonomi dan menyangkut jabatan instansi pemerintahan,

² Departemen RI, *Terjemah Al-Jumanatul ‘Ali Al-Quran*, (Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004), hlm. 71.

³ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011), hlm. 24.

⁴ *Ibid*,

⁵ Mukhamad Murdiono, *Pendidikan Anti Korupsi Terintegrasi dalam Pembelajaran PKn untuk Menanamkan Karakter kejujuran di SMP*, SOCIA Volume 15. No. 1 Juni 2016, 1-12, hlm 169.

sehingga menyebabkan kehancuran perekonomian negara, pelayanan kesehatan yang tidak memadai, dan sistem pendidikan yang rusak.

Menurut M. Cholis Nafis, dalam tindakan korupsi dikitnya ada tiga kejahatan, yaitu: *pertama*, kejahatan yang berdampak pada hilangnya uang negara sehingga tindakan korupsi yang akut akan menyebabkan hilangnya hajat hidup orang banyak, memperlebar kesenjangan social-ekonomi, dan menghilangkan keadilan. *Kedua*, korupsi dapat menghilangkan hak hidup warga negara dan regulasi keuangan negara. Negara yang banyak koruptor akan menyebabkan kemiskinan dan kebodohan. *Ketiga*, kejahatan korupsi menggerogoti kehormatan dan keselamatan generasi penerus.⁶

2. Faktor Penyebab Korupsi

Dalam buku yang berjudul *Peran Parlemen dalam Membasmi Korupsi*, ICW (2000) mengidentifikasi faktor penyebab korupsi ada empat, yaitu sebagai berikut:⁷

a. Faktor Politik

Faktor politik menjadi salah satu penyebab korupsi, karena banyak peristiwa politik yang menggunakan uang atau disebut *dengan money politic*. Politik uang merupakan tingkah laku negatif karena uang digunakan untuk menyogok para pemilih.⁸

⁶ Sumiarti, *Pendidikan Anti-Korupsi*, Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan INSANIA/Vol. 12/No.2/ Mei-Agust 2007, hlm., hlm.3.

⁷ Eko Handoyono, *Pendidikan Antikorupsi (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), hlm. 61.

⁸ *Ibid*,

b. Faktor Hukum

Faktor hukum dapat dilihat dari dua aspek, yaitu aspek perundang-undangan dan lemahnya penegak hukum. Dari aspek perundang-undangan, korupsi disebabkan karena tidak baiknya substansi hukum (aturan diskriminatif dan tidak adil). Dari aspek lemahnya penegak hukum, korupsi disebabkan karena tidak ekuivalen dengan perbuatan yang dilarang sehingga tidak tepat sasaran serta dirasa terlalu ringan atau berat.⁹

c. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab korupsi, terutama di negara-negara yang sistem ekonominya sangat monopolistik. Kekuasaan negara dirangkai dengan informasi orang dalam turut menciptakan kesempatan-kesempatan bagi pegawai pemerintah untuk mempertinggi kepentingan mereka beserta sekutu-kutunya.¹⁰ Rendahnya gaji dan pendapatan bagi pegawai negeri merupakan faktor yang paling menonjol dari meluasnya perbuatan korupsi.¹¹

d. Faktor Organisasi

Organisasi yang menjadi korban korupsi atau dimana korupsi terjadi itu memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Apabila organisasi tidak membuka peluang bagi terjadinya korupsi, maka korupsi tidak akan

⁹ David Wijaya, Pendidikan Anti Korupsi untuk Sekolah dan Perguruan Tinggi, (Jakarta: Penerbit Indeks, 2014), hlm. 13.

¹⁰ Eko Handoyono, *op. Cit*, hlm. 62.

¹¹ David Wijaya, *loc. Cit*, hlm. 14.

terjadi.¹² Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi yaitu: (1) kurangnya keteladanan dari pemimpin, (2) tidak adanya kultur organisasi yang benar, (3) sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai, dan (4) manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya.¹³

Banyak faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi, baik dalam diri pelaku maupun dari luar pelaku. Menurut Yamamah bahwa ketika perilaku materialistik dan konsumtif masyarakat serta sistem politik yang masih “mendewakan” materi maka dapat “memaksa” terjadinya permainan uang dan korupsi. Menurut Nur Syam (2000) bahwa penyebab orang melakukan korupsi adalah karena ketergodaannya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Ketika dorongan untuk kaya tidak mampu ditahannya maka dia akan melakukan korupsi.¹⁴

3. Dampak Korupsi

Korupsi mempunyai dampak yang sangat hebat, utamanya terhadap ekonomi. Menurut Mashal (2011), bahwa korupsi menyebabkan enam hal yaitu (1) Investasi menjadi rendah, termasuk investasi langsung dari luar negeri, (2) mengurangi pertumbuhan ekonomi, (3) mengubah komposisi belanja pemerintah dari aktivitas sangat produktif, (4) ketidaksamaan dan

¹² *Ibid*,

¹³ Eko Handoyono, *op.Cit*, hlm. 63-64.

¹⁴ Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi, *op. Cit*, hlm 39-40.

kemiskinan menjadi lebih besar, (5) mengurangi efisiensi bantuan, dan (6) menyebabkan negara mengalami krisis.¹⁵

Dampak korupsi terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara ada empat, yaitu:

a. *Multiplier Effect* (dampak berlipat ganda)

Dampak ini bisa terjadi apabila ada pengalokasian dana pada proyek investasi yang perampungannya tidak mencapai standar mutu yang diharapkan karena adanya praktek korupsi (misalnya jalan cepat rusak). Dengan demikian, kerugian negara yang terjadi bukan saja sebesar nilai proyek, tetapi dapat menjadi berlipat ganda karena terganggunya aktivitas ekonomi yang akan melibatkan kerugian negara beberapa lipat dari nilai proyek.

b. *Competitiveness Effect* (dampak daya saing)

Dampak ini apabila praktek korupsi lebih menguntungkan satu kelompok atau pelaku ekonomi tertentu, maka akan terjadi distorsi dalam persaingan memperebutkan peluang-peluang ekonomi yang tersedia. Peluang-peluang ekonomi tersedia akan lebih banyak menguntungkan pelaku-pelaku ekonomi yang mempunyai hubungan khusus dengan pejabat publik meskipun pelaku ekonomi yang terbaik dikalangan dunia bisnis. Demikian juga distorsi persaingan dapat terjadi apabila importer dapat memasukan produk dari luar negeri tanpa memenuhi pajak impor yang sewajarnya.

¹⁵ Eko Handoyono, *loc. Cit*, hlm. 69.

c. *Fiscal Effect* (dampak fisikal)

Prakter korupsi juga berdampak pada penerimaan pajak oleh negara karena berlangsung deal antara wajib pajak dan petugas pajak menyangkut beban pajak wajib pajak yang harus ditanggung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Instensitas dari del antara wajib pajak dan petugas pajak dapat mengurangi jumlah yang sangat signifikan dari kewajiban pajaknya terhadap negara dengan membayar yang lebih rendah dari yang seharusnya, tetapi memberikan imbalan tertentu bagi petugas pajak.

d. *Growth and Investment* (pertumbuhan ekonomi dan investasi)

Penelitian-penelitian empiric yang pernah dilakukan di berbagai negara menunjukkan bahwa volume korupsi berasosiasi negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi dalam arti bahwa makin besar volume korupsi, maka volume investasi dan pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan yang signifikan.¹⁶

Dampak korupsi terhadap rusaknya sendi-sendi kehidupan bermasyarakat menurut Harman (2012) ada tuju hal sebagai berikut:

- a. Kondisi negara dalam berbagi bentuk korupsi, suap, dan pemerasan dan pemerasan merupakan bentuk dari penyelewengan, yang merupakan bagian dari warisan Orde Baru. Elemen-elemn negara era Reformasi dipercaya mewarisi praktik bisnis oligarki yang telah dibesarkan pada masa Orde Baru

¹⁶ Sudirman, *Korupsi: Penyebab dan Dampaknya Terhadap Pembangunan Nasional*, Al-Mizan Vol. 9 No. 1 Juni 2013, hlm. 54-56.

- b. Sistem politik terbuka, yang ditunjukkan dengan meningkatnya peran partai politik, pemilu, pemilukada, dan parlemen dengan berbagi kelemahan dan celahnya malah dimanfaatkan oleh oligarki dan elite politik. Patronase yang berkembang dalam sistem oligarki telah membayangi proses pemilu dan pemilukada yang tidak bersih
- c. Pada musim pemilihan, elite politik dan partai politik berperan menjadi penggelontor dana, baik berbentuk uang maupun barang kepada masyarakat calon pemilih. Pengumpulan dan pemberian dana politik ini diterangi untuk mendanai politik uang dan untuk mendapat kembali uang yang telah dikeluarkan ketika kampanye
- d. Sebagai bagian dari masyarakat politik, banyaknya dugaan korupsi atas elite dan partai politik dapat merusak pembentukan dan pertumbuhan karakter dalam kaderisasi politik
- e. Posisi elite politik dan elite negara berpengaruh terhadap masyarakat sebagai figure yang diikuti. Elite yang korupsi, tetapi dermawan kepada kontituensi tetap dibela matia-matian oleh sekelompok masyarakat. Masyarakat menjadi lebih permisif terhadap elite koruptor, karena mempunyai jasa terhadap mereka
- f. Sikap dan perilaku permisif dari masyarakat akan menjadi pendukung bagi pelaku korupsi. Dampaknya, selain masyarakat menjadi tidak peduli pada elite politik sehingga pelaku elite politik menjadi berani melakukan korupsi.

- g. Merosotnya moral dan nilai-nilai budaya yang luhur beriringan dengan melusanya korupsi yang berimplikasi juga pada perilaku koruptif masyarakat. Aliran dana bansos yang diterima pada sejumlah ormas, merupakan indikasi sikap koruptif masyarakat.¹⁷

B. Pendidikan Anti Korupsi

1. Pengertian Pendidikan Anti Korupsi

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti “perbuatan” (hal, cara dan sebagainya). Kata pendidikan berasal dari bahasa Yunani yaitu *paedagogos* yang berarti pergaulan dengan anak-anak. *Paedagogos* berasal dari kata *paedos* (anak) dan *agoge* (saya membimbing, memimpin). *Paedagog* (pendidik atau ahli didik) ialah seseorang yang tugasnya membimbing anak. Sedangkan pekerjaan membimbing disebut *paedagogis*. Istilah ini kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Inggris dengan kata “education” yang berarti pengembangan atau bimbingan.¹⁸

Beberapa ahli yang mengemukakan pengertian pendidikan antara lain, sebagai berikut:

- a. Pendidikan menurut Langveld adalah setiap usaha, pengaruh, perlindungan dan bantuan yang diberikan kepada anak tertuju kepada pendewasaan anak itu, atau lebih tepat membantu anak agar cuku

¹⁷ Eko Handoyono, *loc. Cit*, hlm. 75-76.

¹⁸ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: kalam Mulia, 2002), hlm. 30-31.

cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri. Pengaruh itu datangnnya dari orang dewasa (atau yang diciptakan oleh orang dewasa seperti sekolah, buku, putaran hidup, sehari-hari, dan sebagainya) yang ditujukan kepada orang yang belum dewasa.¹⁹

- b. Mortimer J. Adler mengartikan pendidikan adalah proses dengan mana semua kemampuan manusia (bakat dan kemampuan yang diperoleh) yang dapat dipengaruhi oleh pembiasaan, disempurnakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik melalui sarana yang secara artistik dibuat dan dipakai oleh siapapun untuk membantu orang lain atau dirinya sendiri mencapai tujuan yang ditetapkan, yaitu kebiasaan yang baik.²⁰
- c. Menurut SA. Bratanata dkk pendidikan adalah usaha yang sengaja diadakan baik langsung maupun dengan cara yang tidak langsung untuk membantu anak dalam perkembangannya mencapai kedewasaanya.²¹
- d. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara mendidik adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya.²²

¹⁹ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 2.

²⁰ Muzayyin Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hlm. 13.

²¹ Abu Ahmadi dan Nur Uhbiyat, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2015), hlm. 69.

²² *Ibid*,

Jadi pendidikan adalah usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik untuk membantu intelektual maupun sosialnya sebagai pembekalan dirinya pada waktu dewasa.

Anti korupsi dapat dimaknai sebagai kebajikan atau usaha untuk menghilangkan peluang dari berkembangnya korupsi.²³ Menurut Maheka peluang bagi berkembangnya korupsi dapat dihilangkan dengan cara melakukan perbaikan sistem (hukum dan kelembagaan) dan perbaikan manusia.²⁴

Menurut David Wijaya pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi yang dilakukan melalui pendidikan formal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, serta pendidikan nonformal di masyarakat.²⁵

Pendidikan antikorupsi adalah salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanamkan sikap anti korupsi pada peserta didik di lingkungan sekolah. Pendidikan anti korupsi sebagai salah satu program pendidikan yang menjelaskan dan menanggulangi berbagai korupsi yang terjadi dikalangan masyarakat dengan upaya penanaman sedini mungkin jiwa anti korupsi.²⁶

²³ Arya Maheka, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*, (Jakarta: KPK, Kemitraan Partnership dan Delidn, 2005), hlm. 31.

²⁴ Eko Handoyo, *op. Cit*, hlm 25.

²⁵ David Wijaya, *op. Cit*, hlm. 23.

²⁶ Sutrisno, *Implementasi Pendidikan Anti Korupsi Pada Mata Pelajaran PPKn Berbasis Project Citizen di Sekolah Menengah Atas*, Jurnal Civics Volume 14 Nomor 2, Oktober 2017, hlm. 167.

Pendidikan anti korupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan, upaya untuk mendorong generasi mendatang dengan cara menolak tegas terhadap semua adanya bentuk korupsi.²⁷ Pendidikan anti korupsi dapat dilakukan melalui pendidikan formal di madrasah, pendidikan informal di keluarga, dan pendidikan non formal di masyarakat. Pendidikan ini menekankan pada pemahaman nilai, penghayatan serta penanaman nilai anti korupsi.

2. Tujuan Pendidikan Anti Korupsi

Menurut pendapat para ahli tujuan pendidikan anti korupsi, sebagai berikut:²⁸

- a. Mohammad al-Thoumy tujuan pendidikan anti korupsi adalah pembentukan kesadaran peserta didik akan bahaya korupsi, untuk kemudian bangkit melawannya. Menginspirasi masyarakat untuk aktif melawan korupsi dan untuk menghindari internalisasi sikap permisif terhadap tindakan koruptif. Pendidikan anti korupsi juga berguna untuk mempromosikan nilai-nilai kejujuran.
- b. Menurut Mochtar Buchori dalam konteks pendidikan anti korupsi ini yang penting untuk ditekankan ialah tujuan pendidikan nilai bukan memupuk kemahiran beretorika tentang nilai-nilai atau tentang suatu ideologi. Yang jauh lebih penting ialah menggunakan pengetahuan

²⁷ Ma'as Shabirin, *Model Penanaman Nilai Antikorupsi di Sekolah Dasar*, Jurnal Ilmiah Pendidikan dasar, hlm. 111.

²⁸ Kasinyo Harto, *Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Agama*, Intizar, Vol. 20, No. 1, 2014, hlm. 126-127

tentang dan ketaatan terhadap nilai-nilai untuk memupuk kemampuan membimbing bangsa ke pembaharuan cara hidup (*way of life*) sesuai realita yang ada serta aspirasi tentang masa depan yang masih hidup dalam diri bangsa. Pendidikan nilai tidak terhenti pada pengenalan nilai-nilai, tetapi masih harus berlanjut ke pemahaman nilai-nilai, ke penghayatan nilai-nilai, dan ke pengalaman nilai-nilai. Hanya dengan siklus yang bulat seperti ini dapat diharapkan, pendidikan nilai akan dapat membawa bangsa ke kemampuan memperbaharui diri.

Sedangkan menurut David Wijaya ada lima tujuan pendidikan anti korupsi sebagai berikut:²⁹

- a. Membangun kehidupan sekolah sebagai bagian dari masyarakat melalui penciptaan lingkungan belajar yang berbudaya integritas (anti korupsi), yaitu jujur, disiplin, adil, tanggung jawab, bekerja keras, sederhana, mandiri, berani, peduli, bermartabat.
- b. Mengembangkan potensi kalbu/nurani peserta didik melalui ranah efektif sebagai manusia yang memiliki kepekaan hati dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai budaya sebagai wujud rasa cinta tanah air serta didukung wawasan kebangsaan yang kuat
- c. Menumbuhkan sikap, perilaku, kebiasaan yang terpuji sejalan dengan nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religious
- d. Menanamkan jiwa kepemimpinan yang profesional dan bertanggung jawab sebagai generasi penerus bangsa

²⁹ David Wijaya, *op. Cit*, hlm. 25.

- e. Menyelenggarakan manajemen sekolah secara terbuka, transparan, profesional, serta bertanggung jawab.

3. Metode Pendidikan Anti Korupsi

Menurut David Wijaya ada enam metode yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran pendidikan anti korupsi, yaitu sebagai berikut.³⁰

a. Metode Inquiry

Metode inquiry menekankan pada pencarian secara bebas dan penghayatan nilai-nilai hidup dengan melibatkan siswa secara langsung. Untuk menemukan nilai-nilai tersebut diperlukan pendampingan serta pengarahan oleh guru. Siswa diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan, penadapat, serta penilaian terhadap nilai-nilai yang ditemukan. Metode ini dapat digunakan untuk menanamkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi antara lain kejujuran, keterbukaan, penghargaan, dan toleransi.

b. Metode Pencarian Bersama (Kolaboratif)

Metode kolaboratif menekankan pada pencarian bersama yang melibatkan siswa dan guru. Metode ini berorientasi pada diskusi mengenai permasalahan actual dalam masyarakat, dimana proses diskusi diharapkan dapat menumbukan sikap logis, analitis, sistematis,

³⁰ *Ibid*, hlm. 52-54.

serta imentatif agar dapat mengambil nilai-nilai hidup dari permasalahan yang diolah bersama.

c. Metode Siswa Aktif atau Aktivitas Bersama

Metode aktivitas bersama menekankan pada proses yang melibatkan siswa sejak awal pembelajaran. Guru memberikan pokok bahasan dan siswa di dalam kelompok mencari serta mengembangkan proses selanjutnya. Siswa melakukan pengamatan, pembahasan analisis, sampai proses penyimpulan atas kegiatan mereka. Metode ini mendorong siswa untuk mempunyai kreativitas, ketelitian, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, kerja sama, kejujuran, dan daya juang.

d. Metode Keteladana (Pemodelan)

Metode pemodelan menekankan pada proses penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada siswa melalui keteladana. Pembelajaran awal dilakukan dengan mencontoh tetapi siswa perlu diberikan pemahaman terlebih dahulu.

e. Metode Live In

Metode live in dimaksudkan agar siswa mempunyai pengalaman hidup bersama orang lain secara langsung dengan kehidupan yang berbeda di kehidupannya sehari-hari. Melalui pengalaman langsung, siswa bisa mengenal lingkungan hidup yang berbeda dalam cara berpikir, tantangan, permasalahan, termasuk nilai-nilai hidup.

f. Metode Penjernihan Nilai (Klarifikasi Nilai)

Metode klarifikasi menekankan pada pengajaran agar membantu siswa dalam mencari dan menentukan nilai yang dianggap baik dalam menghadapi persoalan melalui proses menganalisis nilai-nilai yang sudah ada dan tertanam di dalam diri siswa.

Sedangkan menurut Eko Handoyono dalam bukunya yang berjudul pendidikan anti korupsi menyebutkan metode pembelajaran pada mata kuliah pendidikan anti korupsi adalah sebagai berikut:³¹

a. Diskusi di Dalam Kelas (*In-Class Discussion*)

Pembelajaran *in-class discussion* ditujukan untuk menumbuhkan kepekaan atau kesadaran dan kerangka berfikir. Dengan diskusi diharapkan mahasiswa dapat menambah pengetahuan dan pemahaman tentang korupsi.

b. Studi Kasus (*Case Study*)

Metode studi kasus adaah menyajikan kasus ke ruang kelas untuk didiskusikan bersama oleh mahasiswa dan dosen.³² Tujuan *case study* adalah untuk meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap kasus korupsi dan mampu melakukan analisis terhadap kasus tersebut berdasarkan konsep korupsi yang telah disampaikan oleh dosen.

c. Skenario Sistem Pengembangan (*Improvement System Scenario*)

Tujuan metode ini adalah memberikan rangsangan kepada mahasiswa agar memikirkan penyelesaian masalah secara nyata.

³¹ Eko Handoyono, *op. Cit*, hlm. 41.

³² Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, *Buku Panduan Dosen Pembelajaran Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Biro Kerja Sama dan Komunikasi Publik, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, 2016), hlm. 7.

Hampir mirip dengan metode studi kasus, dosen memberikan satu bahan diskusi atau bisa juga mahasiswa diminta mencari kasus sendiri, misalnya kasus korupsi yang nantinya akan dibahas.

d. Kuliah Umum (*Generale Lecture*)

Generale lecture bertujuan untuk mempelajari suatu bahan atau konsep tentang korupsi dan bagaimana pemberantasannya dari seorang praktisi atau orang-orang lapangan yang berkiprah dalam kaitannya dengan persoalan korupsi. Kegiatannya adalah menghadirkan seorang pembicara seperti halnya pemimpin KPK.

e. Diskusi Film (*Film Discussion*)

Metode ini menggunakan media film sebagai media pembelajaran. Kegiatannya adalah seorang dosen memutar film tentang korupsi, kemudian mahasiswa memberi komentar tentang pemutaran film tersebut baik secara kelompok maupun individu.

f. Laporan Investigasi (*Investigative Report*)

Tujuan metode ini adalah mahasiswa memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi dan menganalisis sebuah kasus korupsi yang rill di lingkungan sekitar atau di suatu daerah serta mampu membuat laporan kasus korupsi secara efektif. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan cara mahasiswa turun secara langsung ke lapangan. Langkahnya adalah (a) dosen membentuk kelompok, (b) kelompok menentukan tindakan korupsi dan lokasi terjadinya korupsi, (c) kelompok mahasiswa melakukan investigasi dengan teknik yang benar,

(d) kelompok menyusun laporan yang sudah merekam kasus, data, dan analisis kasus, dan (e) kelompok mempresentasikan laporannya di depan kelas.

g. Eksplorasi Tematik (*Thematic Exploration*)

Metode ini bertujuan untuk membangun cara berfikir yang komprehensif dan menggali sebuah kasus. Kegiatan yang dilakukan adalah mahasiswa melakukan observasi sebuah kasus korupsi atau perilaku koruptif lainnya, selanjutnya menganalisisnya dari berbagai sudut pandang atau perspektif sosial, budaya, hukum, ekonomi, politik, dan sebagainya. Untuk memperkaya pemahaman, mahasiswa dapat menganalisis satu kasus dengan menggunakan perspektif dari penanganan kasus yang dilakukan di negara lain.

h. Prototipe (*Prototype*)

Prototipe adalah sebuah model orisinal atau model pertama dari sesuatu, yang kemudian ditiru atau dikembangkan dalam bentuk lain.³³ Tujuan metode ini adalah penerapan keilmuan atau ciri khas dari perguruan tinggi atau ciri khas lokal dalam mengembangkan teknik antikorupsi. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat prototipe teknologi terkait dengan cara-cara penanggulangan korupsi.

i. Pembuktian Kebijakan Pemerintah (*Prove The Government Policy*)

Kegiatan dalam metode ini adalah kelompok mahasiswa melakukan pengamatan (observasi), terjun ke lapangan untuk melihat

³³ Tim Penulis Buku Panduan Dosen Pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi, *op. Cit*, hlm. 13.

sejauh mana kesesuaian antara janji pejabat pemerintah ketika mereka melakukan kampanye politik selama pemilihan dengan realisasi program kegiatan yang diterima masyarakat.

j. Alat-Alat Pendidikan (*Education Tools*)

Tujuan dari metode ini adalah menciptakan media pembelajaran yang kreatif untuk segmen pendidikan formal maupun publik dalam rangka kegiatan antikorupsi. Kegiatannya adalah mahasiswa dapat mewujudkan kreasi dan inovasinya dengan menciptakan produk yang dapat menjadi media pembelajaran anti korupsi. Produk tersebut bisa berupa peraga antikorupsi yang bersifat animasi maupun nonanimasi. Animasi dapat dibuat dengan memanfaatkan komputer, sedangkan nonanimasi bisa dari komik, kartun dan lain-lain.

k. Pembelajaran Ketrampilan Menulis Terpadu (*Integrated Writing*)

Model pembelajaran ini dapat diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Model pembelajaran ini mahasiswa dibekali dengan ketrampilan berbahasa yang terpadu, dengan harapan mereka mampu meringkas, menyintesis, dan mengembangkan bahan-bahan yang didengar, dibaca, dan didiskusikan untuk selanjutnya menuangkan dalam suatu karya tulis dengan tata bahasa, kosa kata, dan kaidah penulisan yang benar.

l. Pembelajaran Ketrampilan Pemecahan Masalah Sosial (*Social Problem Solving*)

Pembelajaran ketrampilan pemecahan masalah sosial merupakan strategi tepat untuk menempa kemampuan mahasiswa sebagai aktor sosial. Langkah-langkah pembelajaran ketrampilan sosial adalah: (a) mengidentifikasi masalah kebijakan publik, khususnya masalah korupsi yang terjadi di dalam tubuh pemerintah, (b) memilih satu masalah sosial (korupsi) untuk dikaji di dalam kelas, (c) mahasiswa mengumpulkan informasi yang terkait dengan masalah tersebut, (d) mengembangkan portopolio kelas, (e) menyajikan portopolio, dan (f) melakukan refleksi pengalaman belajar.

4. Nilai-Nilai Pendidikan Anti Korupsi

Nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya diantara cara-cara tindakan alternatif.³⁴ Nilai adalah harga atau kualitas sesuatu. Artinya, sesuatu dianggap memiliki nilai apabila secara instrinsik memiliki kemanfaatan. Karena nilai memiliki arti harga, pesan, makna, semangat yang terkandung dalam fakta, konsep, atau teori, maka pada dasarnya nilai tidak berdiri sendiri tetapi disandarkan pada konsep tertentu.³⁵ Dalam hal ini, nilai disandarkan pada anti korupsi, sehingga menjadi nilai pendidikan anti korupsi.

³⁴ Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabet, 2011), hlm. 9.

³⁵ Subur, *Pembelajaran Nilai Moral Berbasis Kisah*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), hlm. 51.

Menurut Nanang dan Romie nilai-nilai anti korupsi adalah sebagai berikut:

a. Kejujuran

Dalam kamus bahasa Indonesia jujur adalah lurus hati, tidak bohong, berkata apa adanya.³⁶ Jujur merujuk pada suatu karakter moral yang mempunyai sifat-sifat positif dan mulai seperti integritas, penuh kebenaran, dan lurus sekaligus tiadanya bohong, curang, ataupun mencuri.³⁷

Jujur adalah mengakui, berkata atau memberikan suatu informasi yang sesuai dengan kenyataan dan kebenaran. Kejujuran ada pada ucapan dan juga perbuatan, sebagaimana seseorang yang melakukan suatu perbuatan, tentu sesuai dengan apa yang ada di batinnya.³⁸

Kejujuran menurut Syaikh Abdul Qadir al-Jaelani memiliki kedudukan yang tinggi dan merupakan tiangnya perkara. Dalam hal ini beliau berkata, ketahuilah bahwa kejujuran adalah tiang segala masalah, kesempurnaan dan ketertibannya. Kejujuran adalah derajat kedua setelah kenabian seperti dalam firman Allah dalam surah an-Nisa 69:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنْ

³⁶ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Pacitan: LPPM Press, 2014), hlm. 80.

³⁷ Mohammad Mustari, *Nilai Karakter (Refleksi untuk Pendidikan)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 12.

³⁸ Subur, *op. Cit*, hlm. 279.

النَّبِيِّينَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ
رَفِيقًا (النساء: ٦٩)

“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul (Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang shaleh. Dan mereka itulah teman yang sebaik-baiknya” (an-Nisa: 69)³⁹

Nilai kejujuran ibarat sebuah mata uang yang berlaku di mana-mana termasuk dalam kehidupan di sekolah atau madrasah. Nilai kejujuran di sekolah atau madrasah dapat diwujudkan oleh peserta didik dalam bentuk tidak melakukan kecurangan akademik, seperti halnya tidak mencontek saat ujian, tidak melakukan kecurangan akademik, tidak memalsukan nilai, dan sebagainya.⁴⁰ Kejujuran sangat penting bagi kehidupan seseorang baik di lingkungan keluarga maupun masyarakat.

b. Kepedulian

Peduli berarti memperhatikan, adanya persaan iba, atau simpati. Kepedulian sosial kepada sesama menjadikan seseorang memiliki sifat kasih sayang. Individu yang memiliki jiwa sosial tinggi akan memperhatikan lingkungan sekelilingnya di mana masih terdapat

³⁹ Departemen RI, *op. Cit*, hlm. 89.

⁴⁰ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *op.Cit*, hlm. 81.

banyak orang yang tidak mampu, menderita, dan membutuhkan uluran tangan.⁴¹

Kepedulian juga diajarkan dalam agama Islam sebagaimana firman Allah sebagai berikut:

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ﴿١﴾ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ
 الْيَتِيمَ ﴿٢﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ (الماعون: ١-٣)

“Tahukah kamu (orang) yang mendustakan agama?, itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin (al-Maun: 1-3)⁴²

Sebagai seorang muslim hendaknya kita saling peduli terutama peduli pada orang miskin dan anak yatim sesuai dengan surat di atas. Rasulullah selama hidup selalu memerintahkan untuk bersidat dermawan dan menghilangkan sifat bakhil. Inti dari adanya kepedulian adalah memahami menolong, memberi, mendukung, menghargai dan memperhatikan.

Nilai kepedulian sangat penting bagi peserta didik sebagai calon generasi masa depan bangsa. Nilai kepedulian dapat diwujudkan dalam bentuk mengindahkan seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku di madrasah maupun di luar madrasah.⁴³

c. Kemandirian

⁴¹ Nadri Taja dan Helmi Aziz, *Mengintegrasikan Nilai-Nilai Anti Korupsi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di Sekolah Mengah Atas, Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. XIII, No. 1, Juni 2016, hlm. 46.

⁴² Departemen RI, *op. Cit*, hlm. 602.

⁴³ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *op. Cit*, hlm. 84

Kemandirian dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memikirkan, merasakan, serta melakukan sesuatu sendiri sehingga tidak bergantung pada orang lain.⁴⁴ Kemandirian dapat membentuk karakter yang kuat pada diri seseorang untuk tidak bergantung pada orang lain. Mentalitas kemandirian yang dimiliki seseorang dapat mengoptimalkan daya fikirnya sehingga dapat bekerja secara optimal.⁴⁵

Kemandirian adalah sikap seseorang tidak bergantung pada orang lain baik tanggung jawab diri sendiri maupun dalam mengerjakan tugasnya. Nilai kemandirian dapat diwujudkan dalam bentuk mengerjakan ujian secara mandiri.

Nilai kemandirian dapat diajarkan pada pembelajaran PAI melalui salah satu dari pembelajaran ahlak terpuji. Nilai kemandirian ketika sudah tertanam pada diri seseorang maka akan berpengaruh pada kehidupannya baik kehidupan di keluarga maupun lingkungannya.

d. Kedisiplinan

Disiplin adalah tindakan individu untuk melaksanakan serta menaati peraturan, tata tertib, dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁴⁶ Disiplin merupakan kunci keberhasilan semua orang, ketekunan, konsisten untuk terus mengembangkan potensi diri,

⁴⁴ David Wijaya, *op. Cit*, hlm. 138.

⁴⁵ Nadri Taja dan Helmi Aziz, *op. Cit*, hlm. 46.

⁴⁶ David Wijaya, *loc. Cit*, hlm. 97.

membuat seseorang mampu memberdayakan dirinya dalam menjalani tugasnya.⁴⁷

Sikap disiplin sangat diperlukan dalam kehidupan di sekolah maupun masyarakat. Disiplin bermanfaat dapat mencapai tujuan hidup dengan efektif dan efisien. Disiplin juga dapat sebagai kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat diri sendiri maupun luar diri.⁴⁸ Sikap disiplin harus dijadikan sebuah kebiasaan hidup, sehingga ketika sudah terbiasa akan menjadikan kemudahan bagi orang yang menjakankan.

e. Tanggung Jawab

Tanggung Jawab menurut Nanang dan Romie adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik disengaja maupun tidak disengaja.⁴⁹ Tanggung jawab merupakan sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya, yang seharusnya dia lakukan terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan, negara dan Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁰

Seseorang harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya sesuai dengan firman Allah dalam surah al-Mudtastir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المُدَّثِّر: ٣٨)

⁴⁷ Nadri Taja dan Helmi Aziz, *loc. Cit*, hlm. 45.

⁴⁸ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *op. Cit*, hlm. 86.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 88.

⁵⁰ Abdul Khakim dan Miftakhul Munir, *Nilai-Nilai Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam*, Jurnal Al-Makrifat Vol 2, No 2, Oktober 2017, hlm. 117.

“Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya” (al-Mudtastir: 38)⁵¹

Nilai tanggung jawab bisa diajarkan dalam materi pendidikan agama Islam. Nilai tersebut ditanamkan melalui pembelajaran yang disampaikan kepada peserta didiknya. Melalui contoh yang diberikan dan kisah-kisah nyata dari seseorang yang sukses dengan tanggung jawabnya diharapkan akan berdampak pada peserta didiknya.

Wujud nilai tanggung jawab diantaranya adalah dengan lulus tepat waktu dengan nilai baik, giat belajar, mengerjakan tugas dengan tepat waktu, selalu memelihara amanah ketika mendapatkannya. Ketika wujud nilai tersebut dijalankan maka akan menjadi seseorang yang bertanggung jawab penuh.

f. Kerja Keras

Kata “kerja” bermakna kegiatan melakukan sesuatu; sesuatu yang dilakukan untuk mencari nafkah. “Keras” berate gigih atau sungguh-sungguh hati. Dengan demikian, kerja keras adalah melakukan sesuatu secara bersungguh-sungguh. Pribadi pekerja keras akan muncul dari sosok yang memiliki motivasi tinggi untuk berubah dan pantang menyerah dalam segala hal. Pribadi pekerja keras dapat diwujudkan dengan selalu melakukan tanggung jawab secara sungguh-sungguh, serta melakukan segala sesuatu dengan upaya terbaik, sekuat tenaga, penuh kecerdasan, dan sepenuh hati.⁵²

⁵¹ Departemen RI, *op. Cit*, hlm. 576.

⁵² Eko Handoyono, *Pendidikan Anti Korupsi (Edisi Revisi)*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2018), cet ke 3, hlm. 32.

Kata kunci kerja keras adalah semangat, gigih, usaha, keyakian, tabah, keras pendirian, pantang menyerah, terus berharap, mempunyai impian.⁵³ Kerja keras akan menghasilkan pencapaian yang memuaskan. Kerja keras seseorang akan terbayar dengan hasil yang akan diperolehnya.

g. Sederhana

Sederhana adalah kebiasaan seseorang untuk berperilaku sesuai kebutuhan dan kemampuannya. Sederhana berarti tidak berlebihan dan tidak mengandung unsure kemewahan.⁵⁴ Hidup sederhana berarti hidup bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Wujud nilai sederhana di sekolah adalah rendah hati dalam pergaulan di sekolah dan kampus, berpakaian dan tidak menggunakan asesoris secara berlebihan, tidak suka pamer, dan lain sebagainya.⁵⁵

Prinsip hidup sederhana juga menghindari dari keinginan yang berlenihan. Keinginan yang berlebihan akan mengakibatkan orang tidak mudah menerima apa yang diperoleh. Sehingga menyebabkan orang akan menghalalkan segala cara termasuk berbuat korupsi.

h. Keberanian

Keberanian berasal dari kata berani, yang artinya mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, dan sebagainya. Keberanian adalah tindakan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini kebenarannya. Orang yang

⁵³ Eko Handoyono, *op. Cit*, hlm. 23.

⁵⁴ David Wijaya, *op. Cit*, hlm. 117.

⁵⁵ Eko Handoyono, *loc. Cit*, hlm. 32.

berani mengatakan salah adalah salah dan benar adalah benar merupakan salah satu nilai terpenting dari pendidikan anti korupsi.⁵⁶ Nilai keberanian dapat diajarkan pada pembelajaran pendidikan agama Islam.

Wujud disekolah adalah berani membela kebenaran dan keadilan walaupun pahit, berani bertanggung jawab apa yang diperbuatnya, berani memutuskan perkara untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Keberanian akan mendatangkan perubahan pada dirinya.

i. Keadilan

Dalam bahasa Arab kata adil berasal dari kata *adl*, yang kata kerjanya adalah *adala*, yang berarti: (1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, (2) melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar), (3) sama, sepadan, atau menyamakan, (4) meneyimbangkan, atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam keadaan yang seimbang.⁵⁷

Keadilan diartikan memberikan hak seimbang dengan kewajiban, atau member sesuai dengan kebutuhannya.⁵⁸ Nilai keadilan dalam kehidupan sekolah dapat diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku yang tidak memilih teman dalam bergaul, memberikan pujian kepada teman yang berprestasi, dan masih banyak lagi.⁵⁹

⁵⁶ David Wijaya, *loc Cit*, hlm. 29.

⁵⁷ Eko Handoyono, *loc. Cit*, hm. 30.

⁵⁸ Mukodi dan Afid Burhanuddin, *op. Cit*, hlm. 90.

⁵⁹ Eko Handoyono, *loc. Cit*, hlm. 30.